

Model Zonasi Ketahanan Pangan dengan Pendekatan Partisipatif di Wilayah Soloraya

Mapping Model of Food Security with Participation Approach in Soloraya Region

Ana Hardiana¹, Malik Cahyadin¹ dan Evi Gravitiani¹

Diterima: 17 September 2012

Disetujui: 30 Oktober 2012

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah: a) melakukan identifikasi kebijakan tata ruang (zonasi) bidang pertanian di wilayah Soloraya, b) melakukan analisis kesesuaian antara kebijakan zonasi bidang pertanian dengan implementasi di lapangan, dan c) melakukan analisis zonasi bidang pertanian untuk mendukung ketahanan dan keamanan pangan dengan pendekatan partisipatif. Metode analisis data meliputi analisis deskriptif dan pemetaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) kebijakan bidang pertanian di wilayah Soloraya tercermin dalam RTRWD dan RPJMD masing-masing daerah. RTRWD mengatur dan menentukan zonasi pertanian sedangkan RPJMD mengatur dan menentukan arah pengembangan pertanian; 2) kesesuaian antara kebijakan dan implementasi pertanian di masing-masing daerah di Soloraya tercermin dari kondisi area panen dan produksi pangan. Masing-masing daerah telah berupaya untuk melakukan penyesuaian tersebut secara bertahap sesuai perencanaan pertanian dalam RTRWD dan RPJMD; dan 3) model zonasi ketahanan pangan di masing-masing daerah ditentukan berdasarkan beberapa asumsi. Hasil akhir zonasi tersebut adalah peta kecamatan produsen pangan yang berada di atas rata-rata tingkat produksi daerah selama kurang lebih dua tahun terakhir.

Kata-kata kunci: model zonasi, ketahanan pangan, kebijakan tata ruang, Soloraya

Abstract: Purposes of this research are: a) to identify spatial policy (mapping) of agriculture in the Soloraya region, b) to analyze the correspondence between spatial policy and implementation in the field of agricultural, and c) to analyze agricultural mapping to support food security and safety with participation approach. Research methods are descriptive analysis and mapping. Conclusions of this research are: 1) agricultural policy in the Soloraya region is reflected in RTRWD and RPJMD. RTRWD conduct and guide the agricultural mapping while RPJMD regulate and determine the direction of agricultural development, 2) correspondence between policy and implementation of agriculture in each region in Soloraya are reflected in form of area and food production conditions. Each region has tried to make adjustments through many stages according to RTRWD and RPJMD, and 3) a mapping model of food security in each region is determined based on several assumptions. The end result of this research is a mapping of food producers in each sub-district for approximately two years.

Keywords: mapping model, food security, spatial planning policy, Soloraya

¹ Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah LPPM, Universitas Negeri Surakarta
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta

Korespondensi : e_gravity2000@yahoo.com

Pendahuluan

Rencana Tata Ruang merupakan suatu perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak (PP No. 47 Tahun 1997). Hampir semua daerah kabupaten/kota telah membuat rencana tata ruang, yang bersifat umum dan merupakan 'potret diri' dari suatu daerah. Rencana tata ruang dibuat untuk menjelaskan dan mengatur keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang dan kawasan. Rencana tersebut terbagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu: kawasan budidaya, penyangga dan lindung.

Rencana tata ruang disusun untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar perubahan yang terjadi menjadi lebih baik, sehingga dapat mewujudkan suatu kawasan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rencana tata ruang merupakan suatu rencana yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan itu sendiri, sehingga harus disesuaikan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengendaliannya. Suatu pembangunan yang berkelanjutan haruslah direncanakan model, cara maupun sistemnya agar sumberdaya dan lingkungan yang dikembangkan dapat tetap lestari.

Kondisi saat ini, pada umumnya rencana tata ruang lebih cenderung mementingkan segi kebutuhan ruang serta nilai ekonomis sedangkan nilai-nilai lingkungan seringkali tidak diperhatikan. Akibatnya daerah akan membuat rencana tata ruang kawasan yang terkait dengan nilai ekonomis seperti kawasan industri, perumahan dan perkantoran, sedangkan rencana tata ruang yang memikirkan nilai ketahanan dan keamanan pangan seringkali terlupakan.

Sampai saat ini kriteria penentuan kawasan (zonasi) untuk ketahanan dan keamanan pangan masih belum jelas (belum ada yang baku) dan pada umumnya diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah. Seharusnya kriteria baku perlu ditetapkan, paling tidak sebagai acuan pemerintah daerah untuk melakukan zonasi kawasan-kawasan yang berpotensi untuk menjaga ketahanan dan keamanan pangan. Kondisi inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu penyusunan model zonasi bidang ketahanan dan keamanan pangan di wilayah Soloraya.

Tinjauan Pustaka

Sistem Perencanaan Strategis Keruangan

Sejak tahun 1960an, sistem perencanaan keruangan di sebagian besar negara Eropa mempunyai struktur yang formal, yaitu adanya hierarki rencana yang menurun dari atas ke bawah (dari tingkat nasional, ke regional, sampai ke rencana lokal tata ruang). Hal ini berdasarkan pada asumsi bahwa kebijakan nasional melalui para politisi, profesional dan administrator dapat diterjemahkan ke rencana perubahan guna lahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan demikian, rencana tata ruang menjadi kunci utama penterjemahan kebijakan pembangunan sektor publik dari atas ke tingkat lokal. Namun seringkali pendekatan "dari atas ke bawah" ini menjadi tidak efektif dalam kondisi sektor non-publik yang lebih dinamis, kemudian melakukan kegiatan proaktif informal dan bentuk-bentuk negosiasi untuk menerobos "kekakuan birokrasi" pembangunan tersebut (Healey dkk, 1997: 10 dalam Djunaedi, 2001).

Mulai tahun 1980an, terjadi gelombang desentralisasi pemerintah yang mereduksi pendekatan "dari atas ke bawah" tersebut. Selain itu, kapasitas dan kompetensi politik dan publik sektor mulai dipertanyakan oleh pihak swasta dan masyarakat, sehingga muncul salah satu ide yaitu reposisi peran perencanaan keruangan dari "providing" (memberikan arahan/kerangka pemanfaatan ruang dan menyediakan prasarana pembangunan) menjadi "enabling" (memberi peluang terjadinya investasi dan pembangunan); juga dari mengatur

menjadi mendorong atau menstimuli pembangunan (Healey dkk, 1997: 10-12 dalam Djunaedi 2001).

Delimitasi Administrasi vs Morfologi Kota

Menurut Conzen 1960, analisis morfologi kota didasarkan pada areal yang secara fisik menunjukkan kenampakan kekotaan (*townscapes*). Areal yang berdasarkan dengan areal bukan kota disebut "*built up area*". Percepatan pertumbuhan kenampakan fisik kekotaan tidak sama untuk setiap bagian terluar kota, maka bentuk morfologi kota sangat bervariasi. Dari waktu ke waktu bentuk fisik kota selalu mengalami perubahan, sementara batas administrasi kota relatif sama untuk periode waktu tertentu. Penentuan batas administrasi kota bertujuan untuk memberikan batas terhadap permasalahan-permasalahan kota, sehingga memudahkan pemecahannya, baik permasalahan politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi dan fisik yang muncul oleh Pemerintah Kota.

Batas fisik kota selalu berubah setiap saat, sehingga sering sekali terlihat bahwa batas fisik kota telah berada jauh di luar batas administrasi kota. Ada 3 macam kemungkinan hubungan antara eksistensi batas fisik kota dan batas administrasi kota (Northam 1979, dalam Sabari Yunus 2002), yaitu: sebagian besar batas fisik kota berada jauh di luar batas administrasi kota, sebagian besar batas fisik kota berada di dalam batas administrasi kota, dan batas fisik kota koinsiden dengan batas administrasi kota.

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja dari masing-masing subsistem tersebut tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (*food utilization*) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga (Deptan, 2010). Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi dari status gizi anak balita (usia di bawah lima tahun). Apabila salah satu atau lebih, dari ketiga subsistem tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak peningkatan kasus gizi kurang dan/atau gizi buruk. Dalam kondisi demikian, negara atau daerah dapat dikatakan belum mampu mewujudkan ketahanan pangan (Deptan, 2010).

Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, ruang lingkup tahun ke-1 (2012) ditekankan pada aspek ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah indikator area produksi dan produksi pangan. Pangan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi hasil atau produk subsektor tanaman pangan (padi, kedelai atau kacang, jagung dan ubi), subsektor peternakan (sapi, kambing/domba dan unggas/itik), dan subsektor perikanan (ikan). *Kedua*, ruang lingkup tahun ke-2 (2013) ditekankan pada aspek keamanan pangan. Keamanan pangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keamanan pangan pada saat proses produksi pangan. Hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian tahun ke-1 (2012).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif berarti penggambaran, ilustrasi maupun penjabaran dari fenomena yang sedang diteliti. Sementara kuantitatif berarti data angka-angka. Dengan demikian, penelitian ini akan menjabarkan data-data angka yang diperlukan sesuai tujuan dan metode penelitian yang sedang digunakan.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan FGD (*focus group discussion*). Wawancara dan FGD ini dilakukan pada SKPD Bidang Pertanian, Bappeda, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah serta kelompok tani di Soloraya. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 responden. Masing-masing

daerah akan diwakili oleh 10 responden dari SKPD/Dinas dan kelompok tani. Fokus dari wawancara dan FGD adalah pada penyusunan Model Zonasi Ketahanan Pangan. Adapun data yang diperlukan adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Daerah di Soloraya, dan data produksi pangan.

Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis pemetaan. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Analisis terhadap informasi kuantitatif dalam bentuk tabel, gambar dan grafik. Analisis terhadap informasi kualitatif dalam bentuk deskripsi hasil wawancara dan FGD. Analisis pemetaan digunakan untuk menggambarkan area produksi pangan – padi, jagung, kedelai, dan ubi – di wilayah Soloraya.

Analisis Hasil

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Gambaran umum wilayah penelitian berisi tentang luas wilayah, batas wilayah jumlah kecamatan dan jumlah penduduk. Informasi dalam gambaran umum tersebut mengacu pada publikasi BPS masing-masing daerah penelitian tahun 2010. Berdasarkan informasi tersebut dapat dijelaskan aspek penting yang dapat menjadi dasar pencapaian ketahanan pangan daerah. Aspek tersebut adalah luas wilayah sebagai basis produksi pangan dan jumlah penduduk sebagai konsumennya. Secara lengkap gambaran umum wilayah penelitian terlihat pada Tabel 1.

Kebijakan Zonasi Bidang Pertanian

Kota Surakarta

Kebijakan zonasi Bidang Pertanian Kota Surakarta tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031. Penjabaran kebijakan pembangunan bidang pertanian dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015. Kedua kebijakan tersebut menjadi rujukan dalam penentuan area dan pengembangan pertanian di Kota Surakarta. Zonasi pertanian dan perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Surakarta diatur pada Pasal 48 Ayat 1 – 6. Penjelasannya sebagaimana pada Tabel 2.

Upaya penerapan kebijakan zonasi pertanian diatas dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui berbagai pendekatan. Pendekatan pembangunan jangka menengah untuk mencapainya telah diatur dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. Di dalam RPJMD tersebut telah dirumuskan Program Misi 1 tentang Ekonomi Kerakyatan. Program-program tersebut adalah:

- Program peningkatan kesejahteraan petani,
- Program pengembangan cadangan pangan daerah,
- Program penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan,
- Program pengembangan Desa Mandiri Pangan,
- Program penyuluhan sumber pangan alternatif,
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan,
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan,
- Program pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Tabel 1. Kondisi Umum Wilayah Penelitian Tahun 2010

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Ha)	Wilayah	Batas Wilayah	Jumlah Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Kota Surakarta	4.404,06	(64% area pemukiman, dan 15% area kegiatan ekonomi)	Utara: Kabupaten Boyolali Selatan: Kabupaten Sukoharjo Barat: Kabupaten Sukoharjo Timur: Kabupaten Karanganyar	5 (Kecamatan terluas dan jumlah penduduk terbanyak adalah Banjarsari)	499.337; rasio jenis kelamin adalah 95,02; pertumbuhan penduduk sebesar - 5,46%.
2	Kabupaten Sragen	94.155	(42,62% adalah lahan sawah dan sisanya bukan sawah)	Utara: Kabupaten Grobogan Selatan: Kabupaten Karanganyar Barat: Kabupaten Boyolali Timur: Kabupaten Ngawi (Jatim)	20 (Kecamatan terluas adalah Sumberlawang, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Sragen)	883.464; rasio jenis kelamin adalah 980; pertumbuhan penduduk sebesar 0,69%
3	Kabupaten Karanganyar	77.378,64	(29,03% adalah tanah sawah dan 70,97% adalah tanah kering)	a.Utara:Kabupaten Sragen b.Selatan: Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo c.Barat: Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali d.Timur: Propinsi Jawa Timur	17 (Kecamatan terluas adalah Tawangmangu, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Karanganyar)	878.210; rasio jenis kelamin adalah 99; pertumbuhan penduduk adalah 0,74%
4	Kabupaten Wonogiri	182.236,02	(area sawah adalah 18,51%, tegal adalah 32,20% dan sisanya adalah bukan pertanian)	Utara: Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar Selatan: Kabupaten Pacitan (Jatim) dan Samudra Indonesia Barat: DIY Timur: Kabupaten Karanganyar dan Ponorogo-Jatim	25 (Kecamatan terluas adalah Pracimantoro, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Wonogiri)	1.245.923; pertumbuhan penduduk sekitar 0,89%
5	Kabupaten Sukoharjo	46.666	(45,62% adalah lahan sawah dan sisanya bukan sawah)	Utara: Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar Selatan: Kabupaten Gunung Kidul – DIY dan Wonogiri Barat: Kabupaten Boyolali dan Klaten Timur: Kabupaten Karanganyar	12 (Kecamatan terluas adalah Polokarto, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Grogol)	846.978
6.	Kabupaten Klaten	65.556	(50,97% adalah lahan pertanian, dan sisanya bukan pertanian)	Utara: Kabupaten Boyolali Selatan: Kabupaten Gunung Kidul (DIY) Barat: Kabupaten Sleman (DIY) Timur: Kabupaten Sukoharjo	26 (Kecamatan terluas adalah Kemalang, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Trucuk)	1.307.562; rasio jenis kelamin adalah 95,93; pertumbuhan penduduk adalah 0,28%.
7.	Kabupaten Boyolali	101.510,19		Utara: Kabupaten Grobogan dan Semarang Selatan: Kabupaten Klaten dan DIY Barat: Kabupaten Magelang dan Semarang Timur: Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Sukoharjo	19 (Kecamatan terluas adalah Kemusu, Kecamatan terbanyak jumlah penduduk adalah Ngemplak)	953.839; rasio jenis kelamin adalah 96,23; pertumbuhan penduduk adalah 0,22%

Sumber: BPS Kabupaten/Kota di Subosukowonosraten (2010)

Tabel 2. Zonasi Bidang Pertanian dan Perikanan di Kota Surakarta

Ayat	Kecamatan	Peruntukan
1	Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres	111 Ha untuk lahan pertanian basah dan kering sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2	Kecamatan Laweyan Kecamatan Banjarsari Kecamatan Jebres	Sawah di kawasan II seluas 32 Ha meliputi sawah di Kelurahan Karangasem seluas 24 Ha dan Kelurahan Jajar seluas 8 Ha Sawah di kawasan III seluas 60 Ha meliputi sawah di Kelurahan Banyuanyar seluas 24 Ha, Kelurahan Sumber seluas 21 Ha dan Kelurahan Kadapiro seluas 15 Ha. Sawah di kawasan IV seluas 14 Ha di Kelurahan Mojosongo.
3	Kecamatan Jebres Kecamatan Pasarkliwon	Lahan kering di kawasan IV seluas 2 Ha di Kelurahan Mojosongo Lahan kering di kawasan I seluas 3 Ha di Kelurahan Semanggi
5	Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres	Kawasan perikanan budidaya dialokasikan di perairan umum darat tersebar di Kelurahan Manahan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar dan Kelurahan Mojosongo
6	Kecamatan Banjarsari	Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebar di Balekambang di depo Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Manahan.

Sumber: RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031

Kabupaten Sragen

Zonasi Bidang Pertanian di Kabupaten Sragen ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031. Kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tersebut didukung oleh kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Sragen diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016.

Kebijakan zonasi pertanian subsektor tanaman pangan sesuai RTRW Kabupaten Sragen tertuang dalam Pasal 56 Ayat 1 – 6. Zonasi pertanian subsektor hortikultura diatur dalam Pasal 57. Zonasi pertanian subsektor peternakan diatur dalam Pasal 59 Ayat 1 - 4. Zonasi pertanian subsektor perikanan diatur dalam Pasal 60. Penjelasan Pasal 56 sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Penjelasan Pasal 59 terlihat pada Tabel 4. Penjelasan Pasal 60 terlihat pada Tabel 5.

Pemerintah Kabupaten Sragen juga telah mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam menerapkan kebijakan pertanian. Identifikasi permasalahan bidang ketahanan pangan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sragen adalah:

1. Kebutuhan pangan semakin meningkat,
2. Ketergantungan pada beras,
3. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga belum terwujud,
4. Database potensi pangan,
5. Konsumsi pangan masyarakat belum beragam dan bergizi seimbang,
6. Mutu produk pangan belum optimal.

Untuk mengantisipasi atau mengatasi permasalahan tersebut, maka rumusan kebijakan sektor pertanian adalah:

1. Pelatihan kepada petani tentang agribisnis,

2. Pemeliharaan produksi pertanian,
3. Pelatihan penerapan teknologi pertanian,
4. Pengembangan desa wisata agro,
5. Pengembangan hasil produksi ternak,
6. Pengembangan irigasi tanah dangkal,
7. Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani,
8. Pengembangan kawasan buah,
9. Jumlah pembuat kompos jerami bertambah.

Tabel 3. Zonasi Bidang Pertanian Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Sragen

Ayat	Kecamatan	Peruntukan
2	Seluruh kecamatan	Pertanian lahan basah dengan luas sekitar 40.339 Ha meliputi: a). sawah irigasi dengan luas sekitar 25.799 Ha. b). sawah bukan irigasi dengan luas sekitar 14.540 Ha.
3	Kecamatan Tangen, Jenar, Gesi, Mondokan, Sukodono, Tanon, Plupuh, Kalijambe, Gemolong, Miri, Sumberlawang, Karangmalang, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Sambungmacan, dan Masaran.	Pertanian lahan kering dengan luas sekitar 24.795 Ha

Sumber: RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031

Tabel 4. Zonasi Bidang Pertanian Subsektor Peternakan di Kabupaten Sragen

Ayat	Kecamatan	Peruntukan
3	Kecamatan Sambirejo, Sukodono, Mondokan, Jenar, Gesi, Miri, Sumberlawang, dan Masaran.	Peternakan unggas skala besar
	Seluruh kecamatan	Peternakan unggas skala kecil

Sumber: RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031

Tabel 5. Zonasi Bidang Pertanian Subsektor Perikanan di Kabupaten Sragen

Kecamatan	Peruntukan
Kecamatan Sumberlawang dan Miri	Budidaya perikanan darat yaitu pengembangan perikanan budidaya berupa keramba jaring apung berada di Waduk Kedung Ombo
Seluruh kecamatan	Budidaya perikanan darat yaitu pengembangan perikanan budidaya berupa kolam ikan

Sumber: RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031

Kabupaten Karanganyar

Zonasi pertanian Kabupaten Karanganyar masih mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lama. RTRW tersebut telah dilakukan peninjauan kembali untuk periode 1997-2006. Kebijakan zonasi ini didukung oleh kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Karanganyar tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013. Penjelasan tentang zonasi bidang pertanian di Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercermin dalam Tabel 6.

Tabel 6. Zonasi Bidang Pertanian Subsektor Perikanan di Kabupaten Karanganyar

Kecamatan	Peruntukan
Kebakkramat, Colomadu, Jaten, Tasikmadu, Karanganyar, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso, Tawangmangu, Metesih, Kerjo, Mojogedang, Karangpandan, Ngarogoyoso, dan Gondangrejo.	Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah seluas 23.030 Ha atau 29,82% dari total wilayah Kabupaten Karanganyar.
Kecamatan Gondangrejo, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso, Tawangmangu, Jenawi, Mojogedang, Kerjo, Tasikmadu, dan Kebakkramat.	Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering

Sumber: Pemerintah Kabupaten Karanganyar (1997). *Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 1997-2006*.

Kebijakan pangan juga telah diatur dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar, yaitu:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan),
2. Peningkatan Kesejahteraan Petani (Lembaga Tani).

Kabupaten Wonogiri

Zonasi pertanian di Kabupaten Wonogiri diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011 – 2031. Kebijakan pembangunan pertanian untuk mendukung zonasi tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. Penjelasan zonasi pertanian Kabupaten Wonogiri terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Zonasi Bidang Pertanian Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Wonogiri

Kecamatan	Peruntukan
Seluruh kecamatan	Luas area tanah sawah sekitar 32.105 Ha yang terdiri atas sawah pertanian pangan berkelanjutan seluas 21.661 Ha, sawah tadah hujan seluas 8.140 Ha dan sawah non PU seluas 2.395 Ha.
Seluruh kecamatan	Luas area tanah kering antara lain tegal/ladang seluas 66.264 Ha, rawa seluas 506 Ha, dan tambak seluas 2 Ha.

Sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031

Kebijakan pertanian pangan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri dilakukan ke dalam lima tahap/tahun. Kelima tahap/tahun tersebut adalah:

1. Tahun Pertama: Penguatan dasar tata kelola daerah,
2. Tahun Kedua: Pengembangan kerjasama antar pemerintah - dunia usaha – masyarakat (investasi),
3. Tahun Ketiga: Pengembangan kerjasama antar pemerintah-dunia usaha – masyarakat (keunggulan produk lokal),
4. Tahun Keempat: Pemantapan keunggulan kompetitif di tingkat regional dan nasional,
5. Tahun Kelima: Perluasan kerjasama dan cakupan investasi.

Kabupaten Sukoharjo

Zonasi pertanian di Kabupaten Sukoharjo dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031. Kebijakan pertanian di Kabupaten Sukoharjo diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. RTRW tentang pertanian dijelaskan pada Pasal 5 ayat 3 huruf a – f, Pasal 33 ayat 1 – 8, Pasal 34, Pasal 50

ayat 6 – 7, dan Pasal 65 ayat 4 – 6. Penjelasan zonasi pertanian Pasal 33 terlihat pada Tabel 8. Tabel 9 menjelaskan Pasal 34.

Tabel 8. Zonasi Bidang Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Peternakan di Kabupaten Sukoharjo

Ayat	Kecamatan	Peruntukan
3	Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Mojolaban, Polokarto, Sukoharjo, Bendosari, Nguter, Tawang Sari, Weru, dan Bulu.	Pertanian lahan basah dengan luas sekitar 21.113 Ha
4	Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, Nguter, Polokarto, Weru, Bulu, dan Tawang Sari.	Pertanian lahan kering dengan luas sekitar 2.629 Ha
8	Kecamatan Nguter, Polokarto, Bendosari, Weru, dan Tawang Sari.	Kawasan peternakan dengan luas sekitar 249 Ha

Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Tabel 9. Zonasi Bidang Pertanian Subsektor Perikanan di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	Peruntukan
Kecamatan Bendosari, Mojolaban, Nguter, Grogol, dan Sukoharjo	Kawasan perikanan dengan luas sekitar 194 Ha untuk kawasan perikanan tangkap
Kecamatan Sukoharjo, Tawang Sari, Grogol, dan Bendosari.	Kawasan perikanan dengan luas sekitar 194 Ha untuk kawasan perikanan budidaya air tawar

Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Kebijakan pertanian di Kabupaten Sukoharjo dijelaskan ke dalam RPJMD, yaitu:

1. Meningkatnya produktivitas perkapita tenaga kerja pertanian menjadi minimal sama dengan standar kebutuhan minimum di tahun 2015.
2. Meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dari 4,92% pada tahun 2009 menjadi minimal 5% pada tahun 2015.

Tabel 10. Zonasi Bidang Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Peternakan di Kabupaten Klaten

Ayat	Kecamatan	Peruntukan
2	Seluruh kecamatan	Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas sekitar 28.949 Ha
5	Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Prambanan, Tulung, dan Wedi.	Kawasan peternakan dengan luas sekitar 434 Ha

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Kabupaten Klaten

Zonasi pertanian di Kabupaten Klaten diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2031. Kebijakan pertanian dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). RPJMD tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015.

RTRW yang mengatur tentang pertanian terletak pada Pasal 32 ayat 1 – 6 dan Pasal 33 ayat 4. Penjelasan Pasal 32 sebagaimana tercermin pada Tabel 10. Penjelasan Pasal 33 pada Tabel 11.

Tabel 11. Zonasi Bidang Pertanian Subsektor Perikanan di Kabupaten Klaten

Ayat	Kecamatan	Peruntukan
3	Kecamatan Bayat Kecamatan Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan, dan Tulung.	Kawasan perikanan budidaya untuk waduk atau rawa dengan luas sekitar 170 Ha Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas sekitar 113 Ha
4	Kecamatan Karanganom, Polanharjo, dan Tulung.	Budidaya perikanan melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditas ikan Nila

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Kebijakan pertanian yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi pertanian yang produktif, unggul dan kompetitif,
2. KUMKM untuk mendukung kebutuhan dan ketahanan pangan,
3. Misi 1, Tujuan 1, Sasaran 1 dan 2 (Kebutuhan Pangan dan Diversifikasi Pangan),
4. Misi 5, Tujuan 1, Sasaran 1 (agropolitan berbasis kecamatan).

Kabupaten Boyolali

Zonasi pertanian di Kabupaten Boyolali diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. Kebijakan pertanian di Kabupaten Boyolali dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. Pasal dalam RTRW yang mengatur tentang zonasi pertanian, yaitu: Pasal 40 ayat 1 – 10 dan Pasal 41 ayat 1-8. Tabel 12 menjelaskan zonasi pertanian subsektor tanaman pangan dan peternakan. Tabel 13 menjelaskan zonasi pertanian subsektor perikanan.

Kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Boyolali telah diatur dalam RPJMD, tercermin dalam sasaran Ketahanan Pangan, yaitu:

1. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau,
2. Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas distribusi pangan,
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya,
4. Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta diversifikasi bahan pangan,
5. Semakin mudahnya akses petani dalam mengakses permodalan untuk pengembangan agribisnis pertanian,

6. Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian,
7. Semakin tingginya produksi dan produktivitas hasil pertanian dengan rendahnya laju alih fungsi lahan pertanian subur,
8. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pengolahan serta berkembangnya sistem agribisnis dengan pengintegrasian kegiatan usahatani,
9. Tingginya peran kelembagaan petani sebagai pusat pemberdayaan masyarakat petani.

Tabel 12. Zonasi Bidang Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Peternakan di Kabupaten Boyolali

Ayat	Kecamatan	Peruntukan
3	Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, dan Juwangi.	Pertanian lahan basah seluas sekitar 23.070 Ha
4	Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, dan Juwangi.	Pertanian lahan kering seluas sekitar 40.106 Ha
5	Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, dan Juwangi.	Pertanian pangan berkelanjutan seluas sekitar 20.000 Ha
6	Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, dan Juwangi.	Cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas sekitar 25.000 Ha
9	Seluruh kecamatan Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Banyudono, Sambu, dan Simo. Seluruh kecamatan	Kawasan peternakan untuk Ternak Sapi potong Kawasan peternakan untuk Ternak Sapi perah Unggas/Itik

Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

Tabel 13. Zonasi Bidang Pertanian Subsektor Perikanan di Kabupaten Boyolali

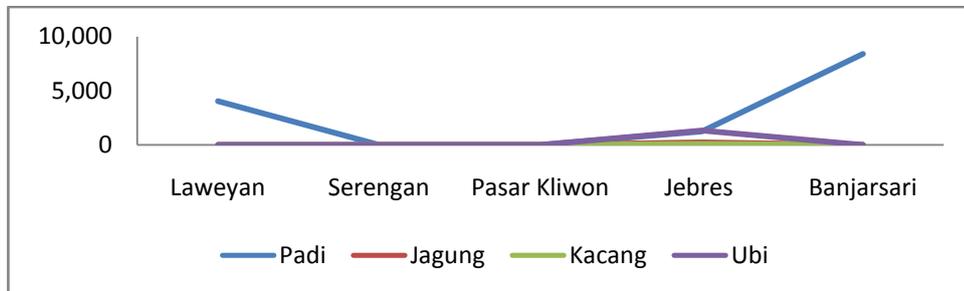
Ayat	Kecamatan	Peruntukan
2	Seluruh kecamatan	Perikanan budidaya perkolaman
3	Kecamatan Sambu, Ngemplak, Kemusu, Juwangi.	Perikanan budidaya karamba
4	Kecamatan Sambu, Ngemplak, Klego, Kemusu, dan Juwangi.	Perikanan tangkap di perairan umum

Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

Kesesuaian Kebijakan dan Implementasi Zonasi Bidang Pertanian Kota Surakarta

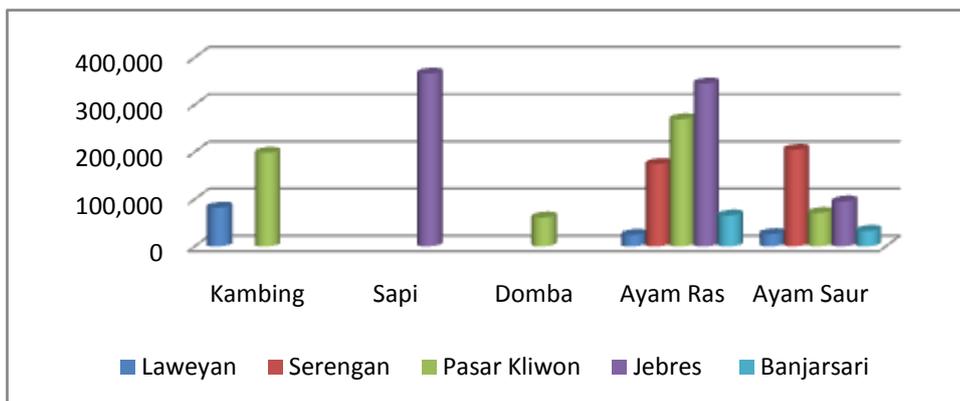
Kota Surakarta mempunyai beberapa produk tanaman pangan utama. Produk tersebut diantara adalah padi, jagung, kacang tanah dan ubi. Pada tahun 2010 produksi padi di Kecamatan Banjarsari cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Selain produk pangan, Kota Surakarta juga merupakan penghasil daging ternak. Beberapa ternak yang diusahakan oleh masyarakat di kota ini adalah sapi, kambing dan unggas/ayam. Penjelasan

produk tanaman pangan dan ternak di Kota Surakarta pada tahun 2010 dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2. Berdasarkan kedua gambar tersebut dapat diharapkan bahwa Kota Surakarta mampu menjadi produsen pangan. Selain itu, kota ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pangan masyarakatnya.



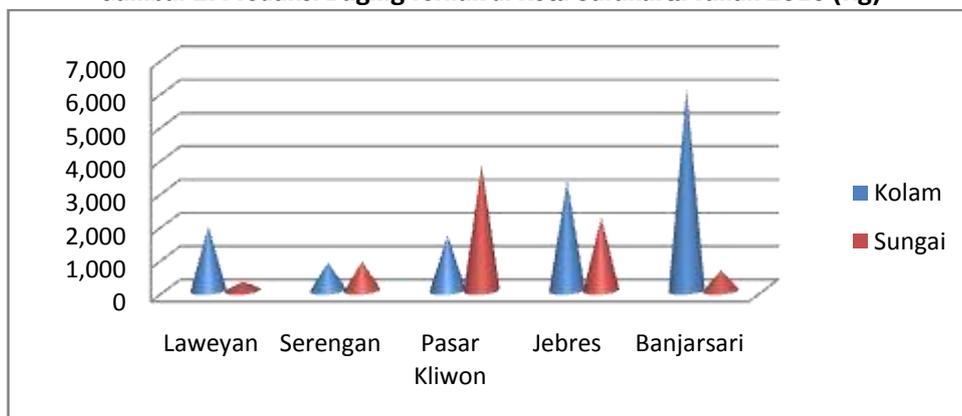
Sumber: Dinas Pertanian dalam BPS Kota Surakarta (2010)

Gambar 1. Produksi Tanaman Pangan di Kota Surakarta Tahun 2010 (Ton)



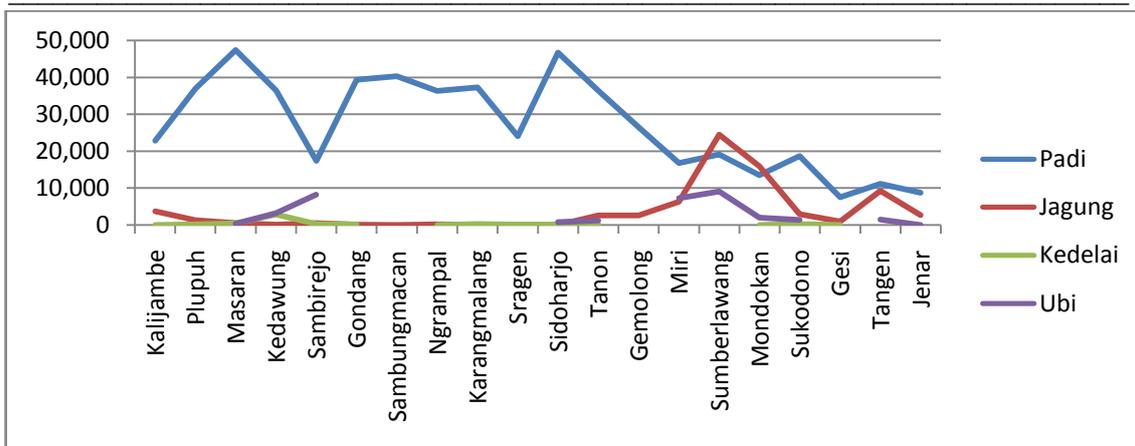
Sumber: Dinas Pertanian dalam BPS Kota Surakarta (2010)

Gambar 2. Produksi Daging Ternak di Kota Surakarta Tahun 2010 (Kg)



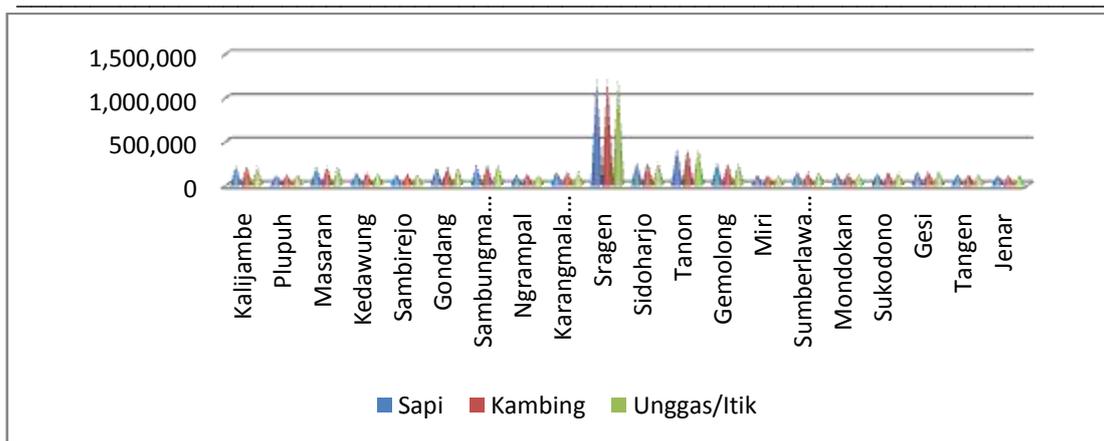
Sumber: Dinas Pertanian dalam BPS Kota Surakarta (2010)

Gambar 3. Produksi Ikan Konsumsi di Kota Surakarta Tahun 2010 (Kg)



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam BPS Kabupaten Sragen (2010)

Gambar 4. Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Sragen Tahun 2010 (Ton)



Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan dalam BPS Kabupaten Sragen (2010)

Gambar 5. Produksi Daging Ternak di Kabupaten Sragen Tahun 2010 (Kg)

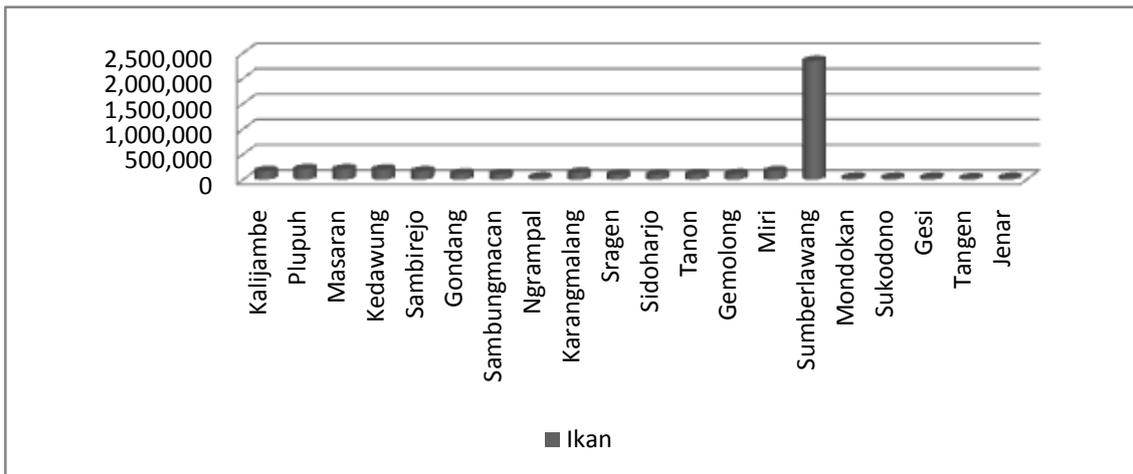
Gambar 3 mendeskripsikan produksi ikan yang dikonsumsi di Kota Surakarta tahun 2010. Produksi ikan terbanyak adalah produksi ikan kolam yang berada di Kecamatan Banjarsari. Berdasarkan perkembangan data-data diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kota Surakarta cenderung mampu mempertahankan sebagai kota produsen pangan. Berdasarkan kebijakan keruangan dan pengembangan pertanian dapat dikatakan bahwa kota ini berupaya untuk mensinergikan antara kebijakan dan implementasinya. Namun demikian, pemerintah daerah perlu bekerja keras untuk mengantisipasi perubahan fungsi lahan dan iklim. Kedua perubahan tersebut akan dapat menjadi kendala kesesuaian antara kebijakan dan implementasi bidang pertanian.

Kabupaten Sragen

Gambar 4 mendeskripsikan produksi tanaman pangan di Kabupaten Sragen tahun 2010. Gambar 5 menjelaskan produksi daging ternak di di Kabupaten Sragen tahun 2010.

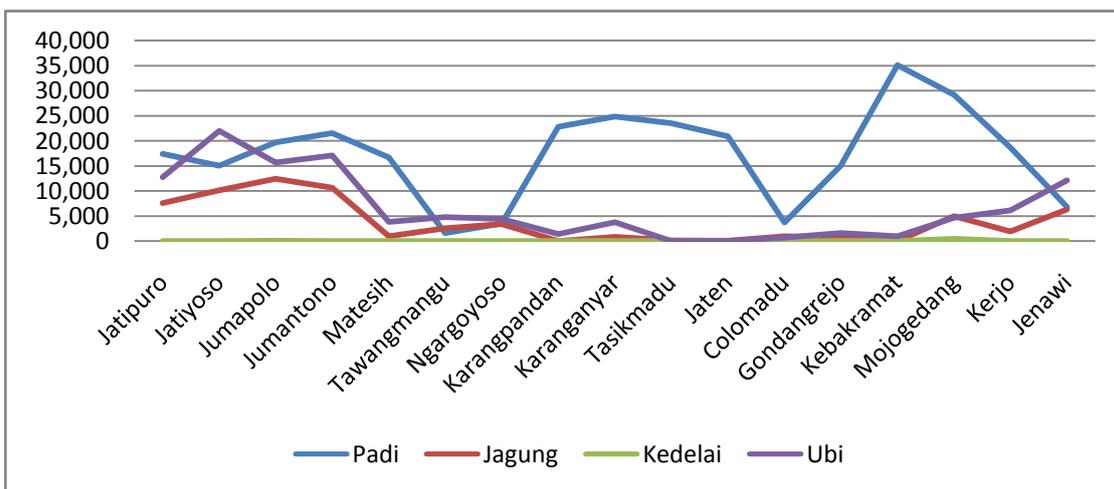
Berdasarkan kedua gambar tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Sragen merupakan salah satu wilayah produsen pangan di Soloraya. Hal ini menjadi salah satu sinyal positif dalam pemenuhan pangan baik di Sragen maupun Soloraya.

Gambar 6 mengilustrasikan produksi ikan di Kabupaten Sragen tahun 2010. Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat indikasi bahwa wilayah ini mencoba untuk mempertahankan sebagai wilayah produsen hasil-hasil sektor pertanian. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sragen juga berupaya untuk mencapai sasaan-sasaran kebijakan yang tertuang dalam RTRWD dan RPJMD. Hal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan tersebut adalah alih fungsi lahan dan perubahan iklim.



Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan dalam BPS Kabupaten Sragen (2010)

Gambar 6. Produksi Ikan di Kabupaten Sragen Tahun 2010 (Kg)

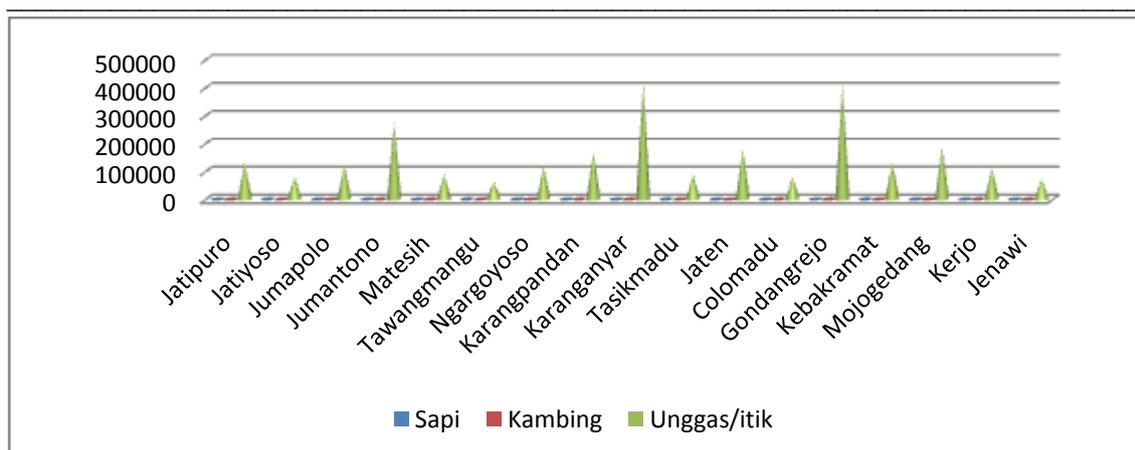


Sumber: Dinas Pertanian dalam BPS Kabupaten Karanganyar (2010)

Gambar 7. Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 (Ton)

Kabupaten Karanganyar

Gambar 7 menjelaskan produksi tanaman pangan di Kabupaten Karanganyar tahun 2010. Gambar 8 mengilustrasikan produksi daging ternak di Kabupaten Karanganyar tahun 2010. Produksi pangan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar mempunyai kemampuan memproduksi. Kemampuan tersebut diharapkan menjadi salah satu indikasi upaya daerah ini sebagai daerah mandiri pangan. Produksi daging ternak di daerah ini juga relatif tinggi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya.



Sumber: Dinas Pertanian dalam BPS Kabupaten Karanganyar (2010)

Gambar 8. Produksi Daging Ternak di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 (Kg)

Gambar 9 menunjukkan produksi ikan di Kabupaten Karanganyar tahun 2010. Ketersediaan ikan di dalam wilayah ini diharapkan menjadi upaya Kabupaten Karanganyar untuk mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini secara langsung menjadi upaya daerah ini untuk mencapai atau menyesuaikan antara kebijakan dan implementasinya. Implementasi kebijakan-kebijakan pertanian menjadi penting karena Kabupaten Karanganyar mempunyai geografis yang sesuai untuk pertanian. Selain itu, infrastruktur dan pelaku usaha di daerah ini terkait erat dengan sektor pertanian.

Kabupaten Wonogiri

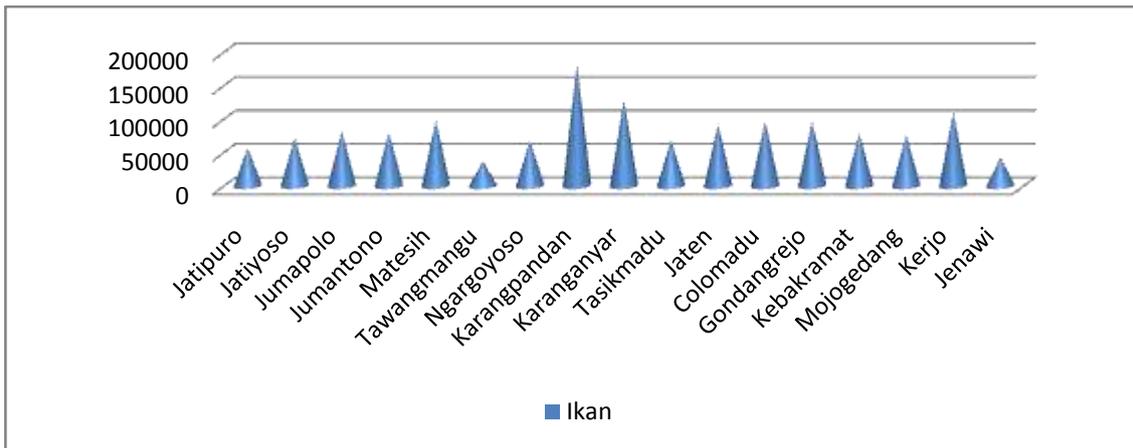
Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah di Soloraya yang mempunyai banyak area dataran tinggi. Kondisi ini dapat memberikan nilai tambah untuk pengembangan sektor pertanian. Kondisi pertanian di daerah ini dapat dilihat pada Gambar 10, 11 dan 12.

Gambar 10 mengilustrasikan kondisi produksi tanaman pangan di Kabupaten Wonogiri tahun 2010. Gambar 11 mendeskripsikan jumlah ternak di Kabupaten Wonogiri tahun 2010. Gambar 12 menjelaskan produksi ikan di Kabupaten Wonogiri tahun 2010. Berdasarkan Gambar 10 dapat diketahui bahwa daerah ini mempunyai kemampuan untuk memproduksi padi, jagung, kedelai dan ubi. Kondisi geografis daerah ini cukup mendukung untuk produksi tanaman pangan tersebut.

Kabupaten Wonogiri juga mempunyai kemampuan untuk memproduksi ternak dan ikan. Kemampuan ini diharapkan menjadi salah satu indikasi positif untuk mengupayakan tercapainya kebijakan-kebijakan pertanian yang telah dirumuskan. Upaya tersebut akan

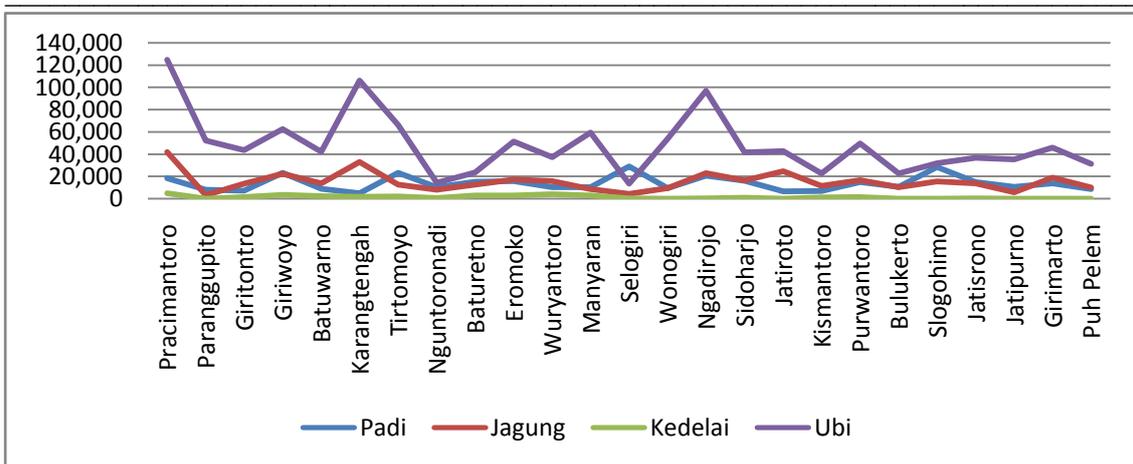
menjadi salah satu dasar atau pijakan kesesuaian antara kebijakan dan implementasi pertanian.

Pada tahun 2012 pemerintah telah merumuskan prediksi kalender tanam sawah. Hal ini ditujukan untuk mempermudah petani dan pemerintah daerah dalam memproduksi padi secara maksimal. Keberadaan kalender tanam bagi Kabupaten Wonogiri akan membantu daerah untuk memprediksi kemampuan produksinya. Kemampuan produksi tersebut akan membantu daerah ini dalam menentukan posisi kemandirian pangan daerah.



Sumber: Dinas Pertanian dalam BPS Kabupaten Sragen (2010)

Gambar 9. Produksi Ikan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 (Kg)



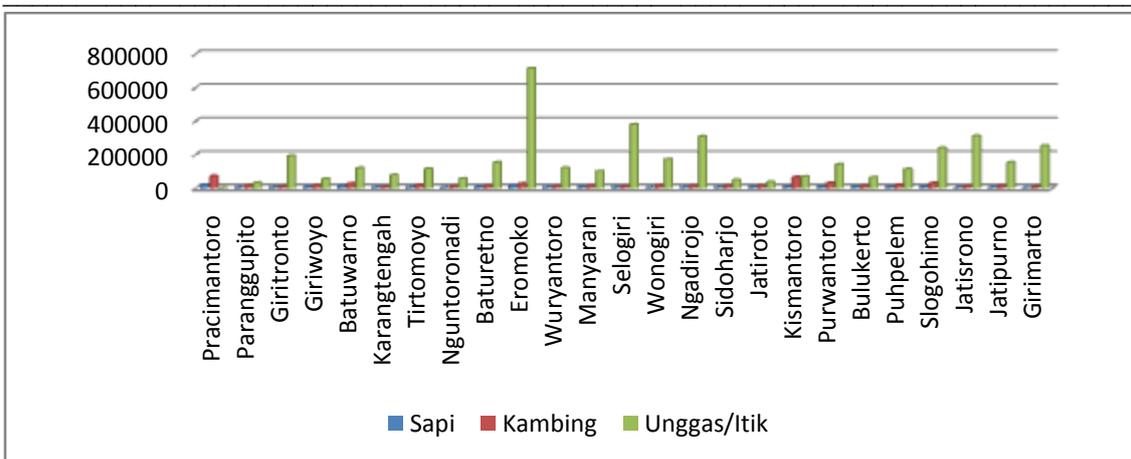
Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam BPS Kabupaten Wonogiri (2010)

Gambar 10. Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 (Ton)

Kabupaten Sukoharjo

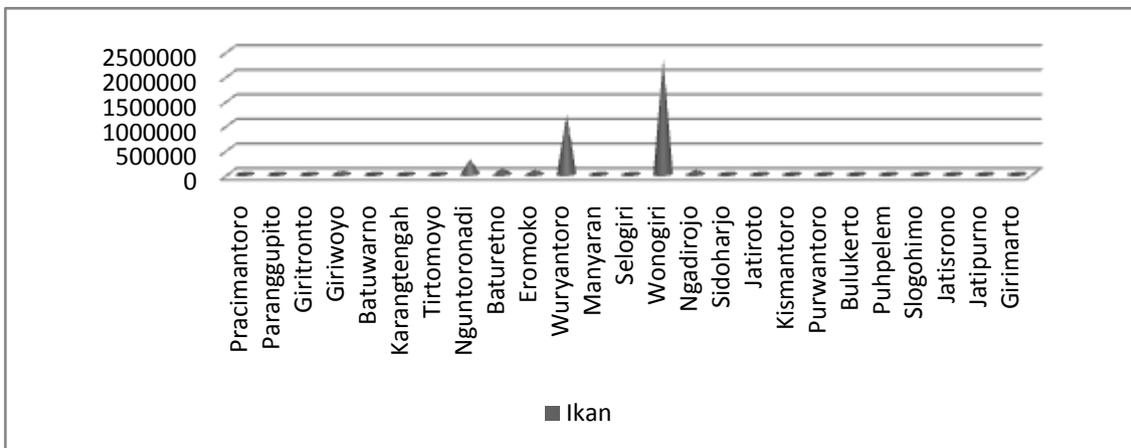
Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah di Soloraya dengan kondisi geografis sesuai untuk pengembangan pertanian. Produksi tanaman pangan di daerah rela-

tif mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Gambar 13 mendeskripsikan kondisi produksi tanaman pangan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2010. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa produksi padi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produksi jagung, kedelai dan ubi. Hal ini diharapkan bahwa Kabupaten Sukoharjo masih menjadi salah satu daerah mandiri pangan padi (beras).



Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam BPS Kabupaten Wonogiri (2010)

Gambar 11. Jumlah Ternak di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 (Ekor)



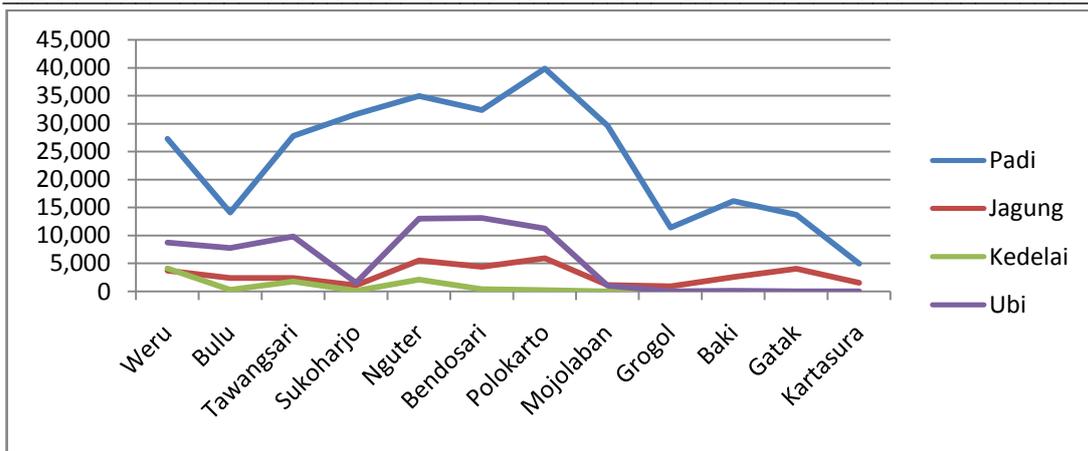
Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam BPS Kabupaten Wonogiri (2010)

Gambar 12. Produksi Ikan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 (Kg)

Gambar 14 mendeskripsikan jumlah ternak di Kabupaten Sukoharjo tahun 2010. Gambar 15 mengilustrasikan jumlah ikan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2010. Kedua gambar tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa daerah ini juga sebagai produsen peternakan dan perikanan. Semua informasi tentang kondisi tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kalender tanam tersebut menunjukkan indikasi bahwa pemerintah daerah berupaya untuk mencapai sasaran/target kebijakan pertanian yang telah dirumuskan.

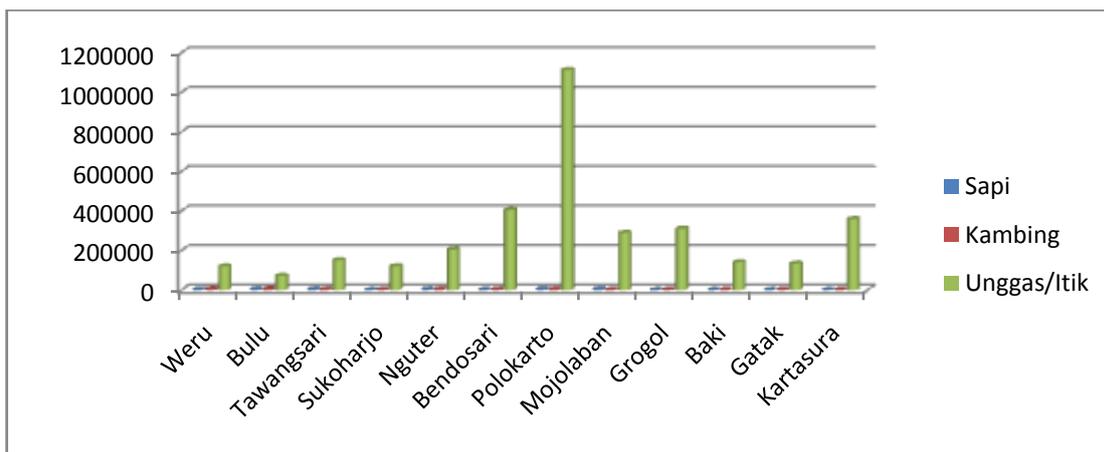
Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah di Soloraya yang berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, daerah ini mempunyai kesesuaian untuk produksi pertanian. Kondisi luas area panen tanaman pangan di Kabupaten Klaten tahun 2010 dapat dilihat pada Gambar 16. Gambar ini memberikan informasi bahwa luas area panen untuk tanaman padi relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah. Upaya yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah adalah mempertahankan luas area panen tanaman pangan tersebut untuk tidak cenderung menurun.



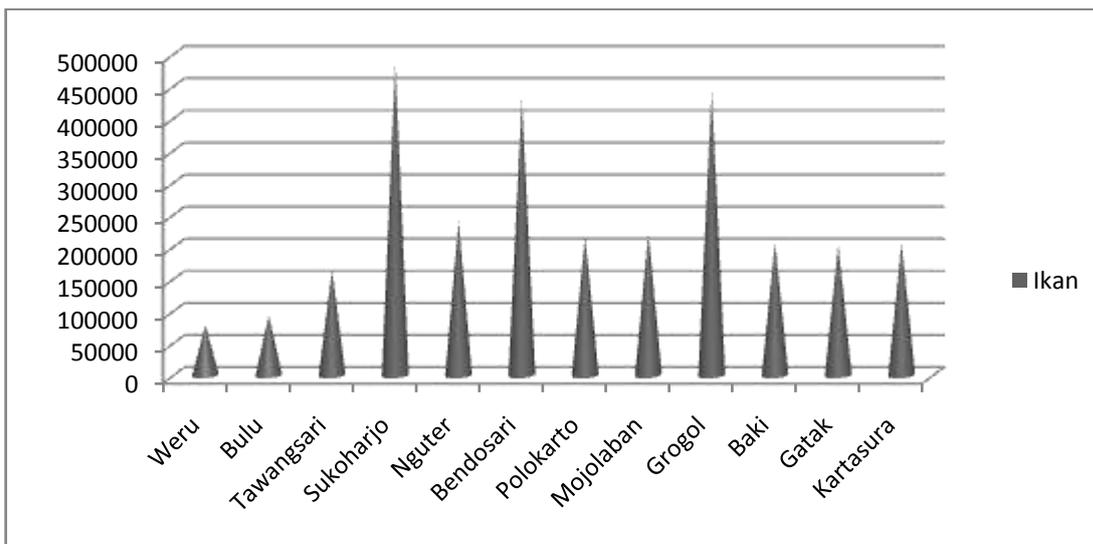
Sumber: Dinas Pertanian dalam BPS Kabupaten Sukoharjo (2010)

Gambar 13. Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 (Ton)



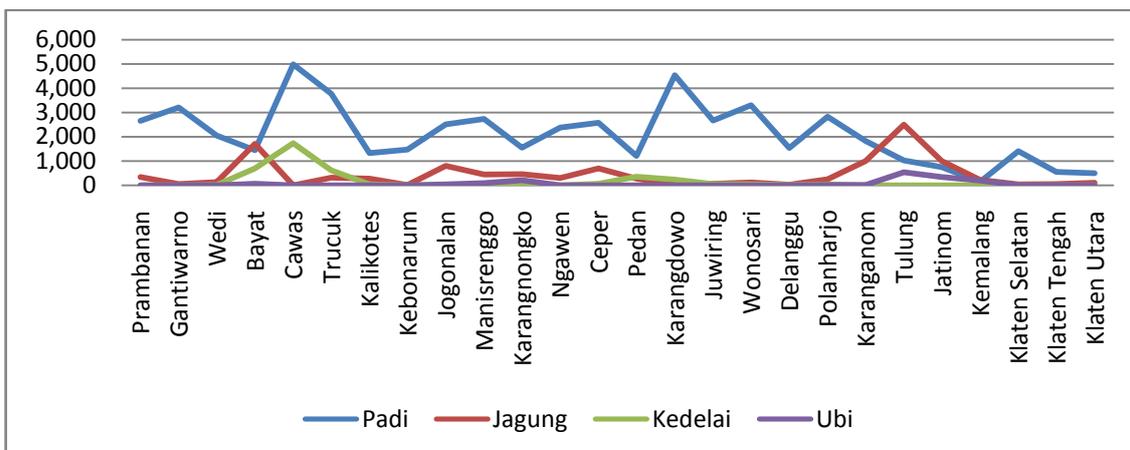
Sumber: Dinas Pertanian dalam BPS Kabupaten Sukoharjo (2010)

Gambar 14. Jumlah Ternak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 (Ekor)



Sumber: Dinas Pertanian dalam BPS Kabupaten Sukoharjo (2010)

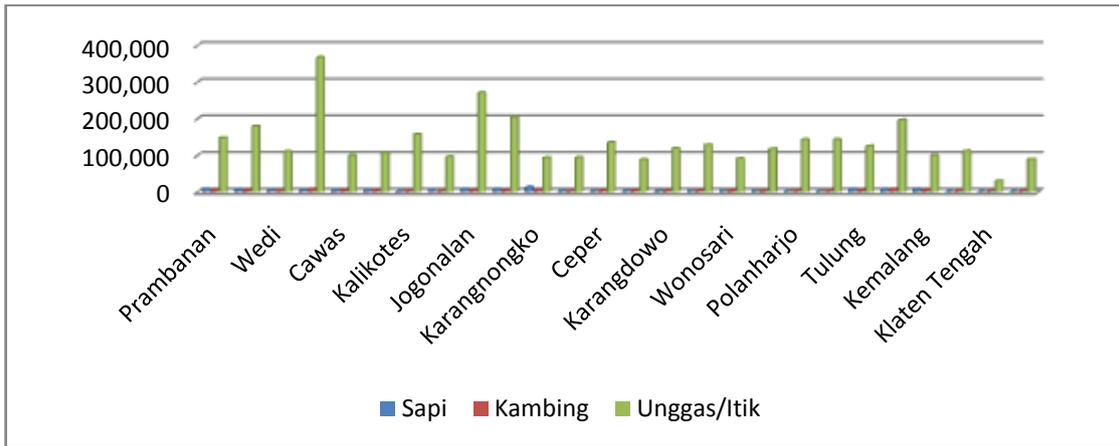
Gambar 15. Jumlah Ikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 (Ekor)



Sumber: Dinas Pertanian dalam BPS Kabupaten Klaten (2010)

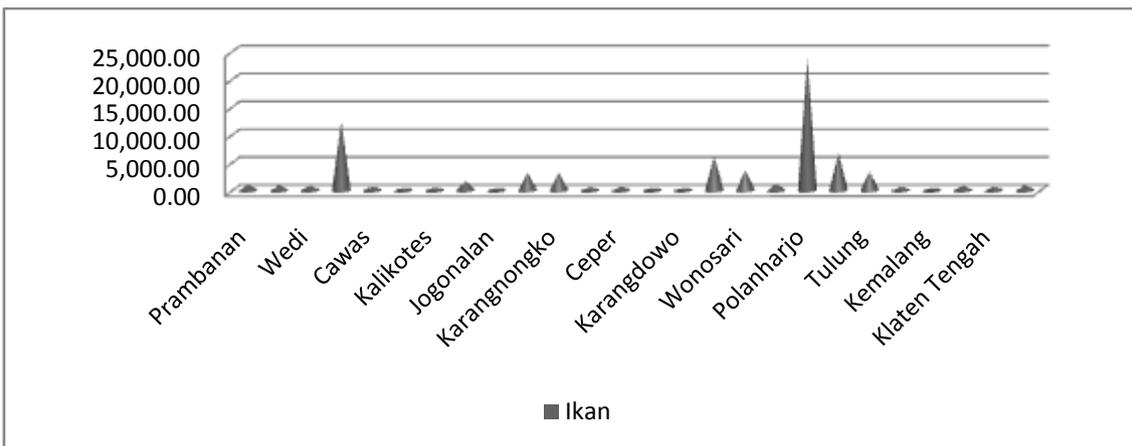
Gambar 16. Luas Area Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Klaten Tahun 2010 (Ha)

Gambar 17 mengilustrasikan jumlah ternak di Kabupaten Klaten tahun 2010. Gambar 18 mendeskripsikan produksi ikan di Kabupaten Klaten tahun 2010. Berdasarkan Gambar 17 dapat diketahui bahwa daerah ini cenderung dominan dalam produksi unggas/itik. Secara langsung, kondisi ini diharapkan bahwa daerah ini dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam bentuk hasil ternak secara mandiri. Semua informasi tentang kondisi pertanian dan kalender tanam ini menjadi salah satu dasar bahwa daerah ini berupaya untuk mencapai kebijakan pertanian yang telah ditetapkan.



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam BPS Kabupaten Klaten (2010)

Gambar 17. Jumlah Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2010 (Ekor)

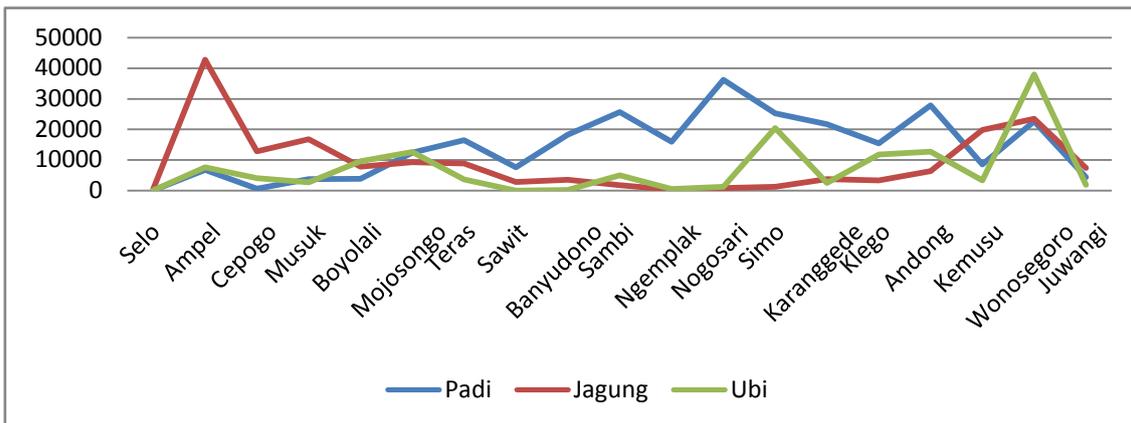


Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam BPS Kabupaten Klaten (2010)

Gambar 18. Produksi Ikan di Kabupaten Klaten Tahun 2010 (Kw)

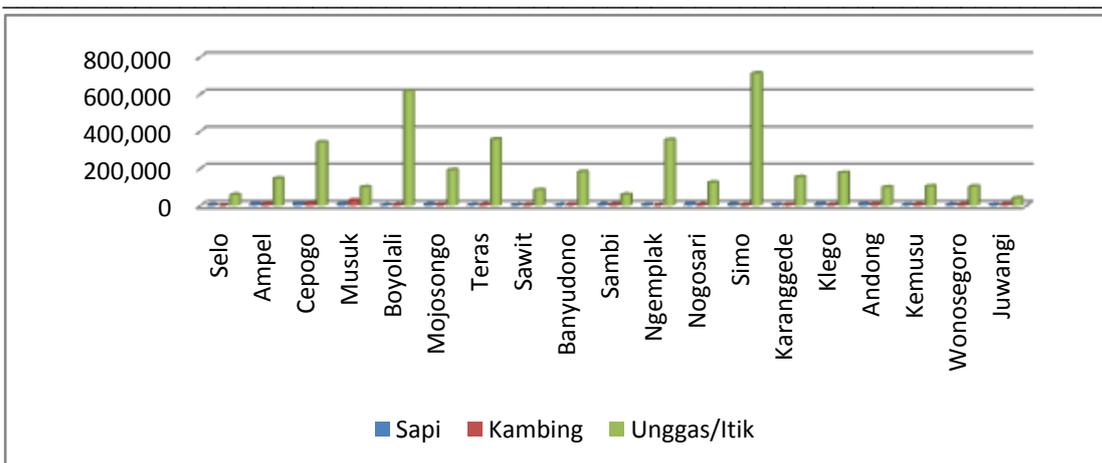
Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan daerah di wilayah Soloraya yang mempunyai dataran tinggi dan rendah. Kondisi ini memungkinkan daerah ini untuk memproduksi tanaman pangan dan ternak. Gambar 19 mendeskripsikan produksi tanaman pangan di Kabupaten Boyolali tahun 2010. Gambar 20 mengilustrasikan kondisi jumlah ternak di Kabupaten Boyolali tahun 2010. Gambar 21 mendeskripsikan produksi ikan di Kabupaten Boyolali tahun 2010. Semua informasi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai upaya untuk menyesuaikan antara kebijakan dan implementasi pertanian.



Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam BPS Kabupaten Boyolali (2010)

Gambar 19. Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Boyolali Tahun 2010 (Ton)



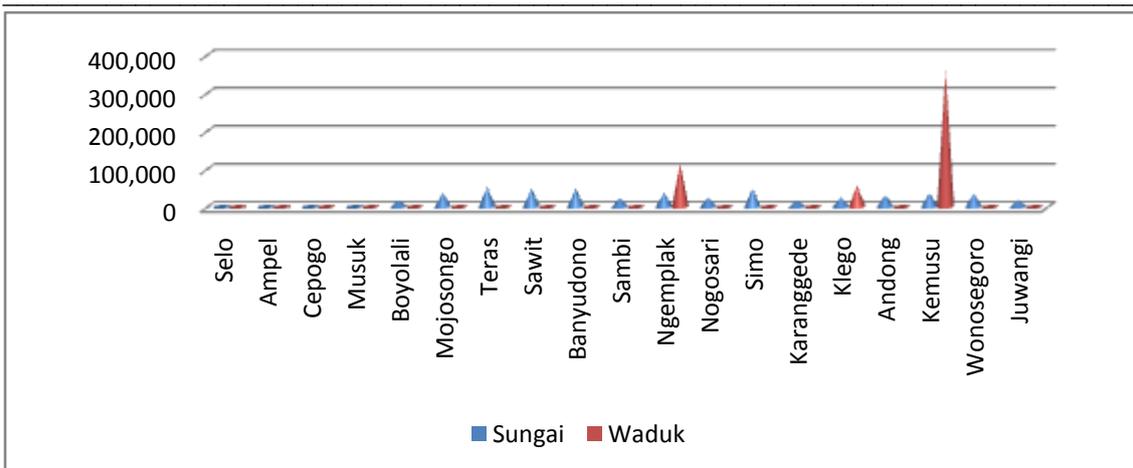
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan dalam BPS Kabupaten Boyolali (2010)

Gambar 20. Jumlah Ternak di Kabupaten Boyolali Tahun 2010 (Ekor)

Model Zonasi Ketahanan (Produksi) Pangan

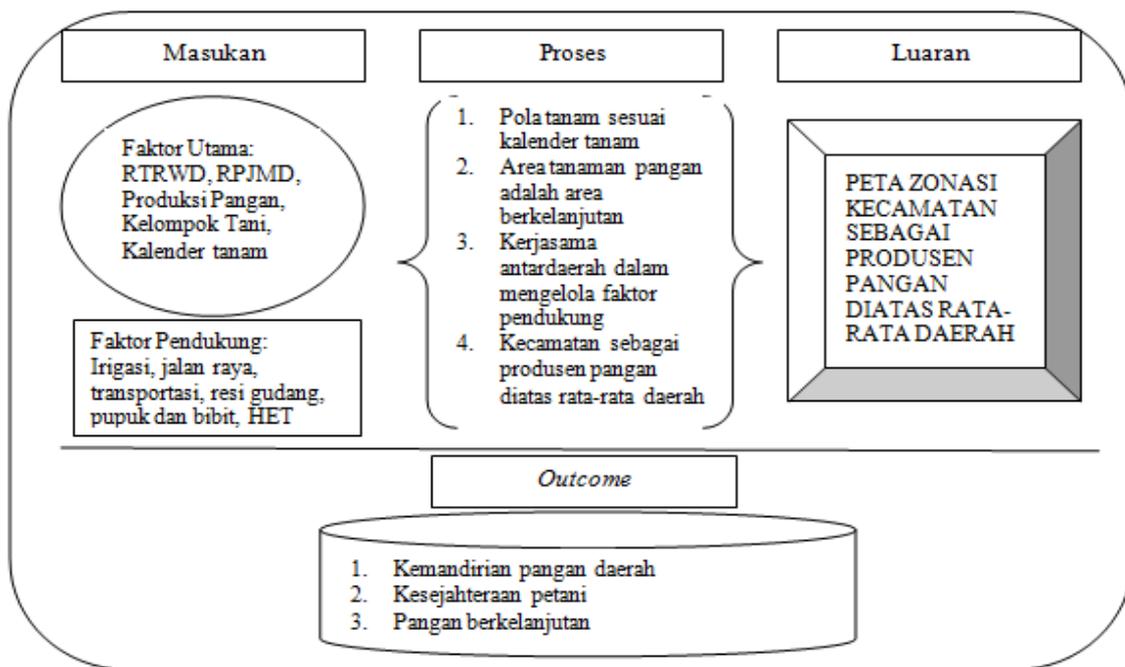
Model zonasi ketahanan/produksi pangan di wilayah Soloraya ditentukan berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

1. Pemerintah Daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam menentukan area produksi dan sasaran/target pangan. Hal ini tercermin dalam kebijakan RTRW dan RPJMD.
2. Petani mempunyai keinginan untuk tetap berproduksi. Hal ini tercermin dalam informasi produksi pangan masing-masing daerah. Kelompok tani mempunyai kegiatan dan pengembangan usaha pertanian secara aktif.
3. Ada kecamatan yang mampu mempunyai area panen dan/atau produksi pangan diatas rata-rata daerahnya minimal 2 tahun terakhir.
4. Ada keterkaitan antardaerah untuk saling memenuhi kekurangan kebutuhan pangan di wilayahnya.
5. Model zonasi dibentuk dengan tiga unsur, yaitu: masukan, proses, luaran dan *outcome*.



Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan dalam BPS Kabupaten Boyolali (2010)

Gambar 21. Produksi Ikan di Kabupaten Boyolali Tahun 2010 (Kg)



Gambar 22. Model Zonasi Ketahanan (Produksi) Pangan di wilayah Soloraya

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

Kebijakan bidang pertanian di wilayah Soloraya tercermin dalam RTRWD dan RPJMD masing-masing daerah. RTRW mengatur dan menentukan zonasi pertanian sedangkan RPJMD mengatur dan menentukan arah pengembangan pertanian.

Kesesuaian antara kebijakan dan implementasi pertanian di masing-masing daerah di Soloraya tercermin dari kondisi area panen dan produksi pangan. Masing-masing daerah telah berupaya untuk melakukan penyesuaian tersebut secara bertahap sesuai perencanaan pertanian dalam RTRWD dan RPJMD.

Model zonasi ketahanan pangan di masing-masing daerah ditentukan berdasarkan beberapa asumsi. Hasil akhir zonasi tersebut adalah peta kecamatan produsen pangan yang berada di atas rata-rata tingkat produksi daerah selama kurang lebih dua tahun terakhir.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rumusan saran penelitian ini adalah:

Pemerintah daerah diharapkan dapat berupaya lebih maksimal untuk menerapkan RTRWD dan RPJMD yang telah disusun. Kelompok tani diharapkan lebih aktif untuk “mengawal” penerapan kedua dokumen kebijakan tersebut.

Kesesuaian antara kebijakan dan implementasi pertanian terkendala oleh perubahan fungsi lahan dan perubahan iklim. Pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan *reward and punishment* terhadap pemilik lahan pertanian. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mampu bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset untuk mengembangkan bibit unggul yang mampu menyesuaikan terhadap perubahan iklim.

Model zonasi yang menghasilkan kecamatan-kecamatan dengan tingkat produksi pangan di atas rata-rata daerah diharapkan dapat menjadi penyangga produksi pangan di wilayah Soloraya.

Penelitian tahun berikutnya akan memfokuskan pada aspek keamanan pangan. Keamanan pangan tersebut akan ditekankan pada keamanan proses produksi pangan terhadap lingkungan.

Daftar Pustaka

- BPS Kota Surakarta, 2009, Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2009, Surakarta.
 _____, 2010, Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2010, Surakarta.
- BPS Kabupaten Sragen, 2009, Sragen Dalam Angka Tahun 2009, Sragen.
 _____, 2010, Sragen Dalam Angka Tahun 2010, Sragen.
- BPS Kabupaten Karanganyar, 2009, Karanganyar Dalam Angka Tahun 2009, Karanganyar.
 _____, 2010, Karanganyar Dalam Angka Tahun 2010, Karanganyar.
- BPS Kabupaten Wonogiri, 2009, Wonogiri Dalam Angka Tahun 2009, Wonogiri.
 _____, 2010, Wonogiri Dalam Angka Tahun 2010, Wonogiri.
- BPS Kabupaten Sukoharjo, 2009, Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2009, Sukoharjo.
 _____, 2010, Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2010, Sukoharjo.
- BPS Kabupaten Klaten, 2009, Klaten Dalam Angka Tahun 2009, Klaten.
 _____, 2010, Klaten Dalam Angka Tahun 2009, Klaten.
- BPS Kabupaten Boyolali, 2009, Boyolali Dalam Angka Tahun 2009, Boyolali.
 _____, 2010, Boyolali Dalam Angka Tahun 2010, Boyolali.
- Conzen, M.R.G. 1960, *“Alnwick, Northumberland: A Study in Town Plan Analysis”*, in I.B.G Monograph No 27, London.
- Djunaedi, Achmad. 2001. “Alternatif Model Penerapan Perencanaan Strategis dalam Penataan Ruang Kota Di Indonesia”. *Jurnal PWK*, ITB, Maret 2001: 16-28.
- Healey, Patsy; Abdul Khakee; Alain Motte; dan Barrie Needham (eds.). 1997. *Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe*. UCL Press, London.
- Northam, R.M. 1979, *Urban Geography*, Toronto: John Wiley and Sons.
- Prahasta, Eddy (2006). Sistem Informasi Geografis Konsep-konsep Dasar. Penerbit Informatika. Bandung.
- Sabari Yunus, Hadi, 2002, Struktur Tata Ruang Kota, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.